

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi pernikahan dalam bahasa Indonesia merupakan sebuah kata benda yang memiliki arti hal (perbuatan) nikah, sedangkan istilah nikah sendiri dalam terminologi, merupakan sebuah ikatan (Akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama: hidup sebagai suami istri tanpa; merupakan pelanggaran terhadap agama¹. Dalam bahasa Arab kata nikah berasal dari kata *nikāhun* yang merupakan *mashdar* dari lafadz *nakaha* dan memiliki sinonim *tajawwaza* dan diperistilahkan dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan (menurut Rahmat Hakim).²

Nikah bermakna *ad-dammu* dan *al-jam'u* (berkumpul), makna nikah bisa diartikan dengan *'aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah atau *wath'u al-zaujah* yang artinya bersetubuh. Pernikahan bukan hanya sekedar pernyataan untuk menghalalkan tindak dan tutur antara seorang wanita dengan laki-laki, namun pernikahan merupakan *iqrar* yang suci, saling mengikat satu sama lain dan bersifat sakral. Oleh karenanya pernikahan tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan, pernikahan wajib dilaksanakan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah disyari'atkan Islam dan harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana pernikahan adalah suatu perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT yang termaktub dalam Surat ke-24 *An-Nūr* ayat 32 yang berbunyi:

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.235

² Sahrani dkk, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 4

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”(QS. An Nuur : 32)³

Menurut ayat diatas jika seseorang yang sendiri atau yang belum menikah maka harus dinikahkan, menurut Imam Aj-Jalalain Al-Maskulani dalam tafsirnya menjelaskan ayat diatas sebagai berikut:

جَمْعُ أَيْمٍ : وَهِيَ مَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ بَكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَمَنْ لَيْسَ لَهُ زَوْجٌ وَهَذَا فِي الْأَحْرَارِ وَالْحَرَائِرِ⁴

Jamak kata dari kata ayyima : dan arti kata ayyima adalah seseorang yang belum menikah dalam keadaan perawan atau dalam keadaan lajang yang belum menikah dan hal ini dalam keadaan merdeka.

Maka dari itu jika seseorang dalam keadaan perawan/pemuda yang belum menikah maka mereka harus dinikahkan apabila mereka dalam keadaan merdeka. Keadaan merdeka adalah keadaan dimana seseorang tidak dalam naungan tuannya, atau bukan seorang budak, jika seorang budak menikah maka harus menunggu kebijakan dari tuannya, dan kebijakan tersebut harus diberikan kepada budaknya. Akan tetapi hal kemerdekaan seseorang sudah didapatkan penuh karena sistem perbudakan sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Maka dari itu jika muda/i zaman sekarang ingin menikah dan telah mampu maka pantas untuk disegerakan karena hal ini bisa menundukan pandangan dan menutupi tindakan perzinahan yang akan datang bagi mereka.

³ Kementrian Agama, *Tafsir Al-Quran*, (Jakarta: Mutiara, 1902), hlm. 683

⁴ Imam Jalaludin Al-Mahaly, dan Jalaludin As-Suyuthi, *Tafsir Aj-Jalalain*, (Pada Makatabah Shameela) hlm. 334

Dalam pernikahan urusan harta dikesampingkan karena jika pernikahan mengukur harta maka untuk sebagian orang tidak akan bisa melakukan pernikahan, jika ukuran kadar harta yang ditentukan melampaui kemampuan seseorang, terkhusus bagi laki-laki yang akan memberikan *mahar* bagi perempuan. Maka dari itu Allah SWT telah berjanji jika pasangan muda/i ingin menikah jangan pernah takut akan kemiskinan karena Allah akan memberikan kekayaan yang luas setelah pernikahan tersebut dilakukan oleh mereka berdua.

Seiring perkembangan zaman banyak sekali macam kasus yang melatar belakangi terjadinya pernikahan, selain dari murni dalam menunaikan *sunnah*/perintah syariat agama. Diantaranya adalah kasus pernikahan karena memperkuat ikatan status bisnis antara kedua orang tua kedua pasangan, dan ada juga pernikahan untuk menjaga status sosial keluarga. Akan tetapi kedua hal tersebut tidak merusak ketentuan *syariat* Islam. Adapun kasus pernikahan yang dilatar belakangi karena adanya tindakan yang melanggar *syariat* dan sudah sering terjadi dikalangan masyarakat, yakni kasus pernikahan atas dasar perzinahan sehingga mengakibatkan kehamilan dan barulah terjadi pernikahan dalam masa kehamilan terjadi, ataupun setelah lahir anak dari kandungan tersebut.

Kasus pernikahan atas dasar perzinahan selalu terjadi dalam setiap tahunnya,⁵ faktor di atas mendorong mengapa banyaknya orang yang melakukan pernikahan atas landasan hamil di luar nikah dengan alasan untuk kemaslahatan dan menjaga nama baik kedua belah pihak keluarga, karena hal tersebut terjadi atas

⁵ M. Reza Sulaiman, dan Risna Halidi, *Perkawinan Anak Catatan Hitam Di Hari Anak Perempuan Internasional 2019*, (Suara.com: Jum'at 11 Oktober 2019) Diakses Pada Minggu 29 Desember, 2019.

dasar adanya ikatan yang belum sah atau yang sering kita kenal dengan status pacaran. Status pacaran ini adalah dampak paling utama dari dasar pernikahan hamil diluar nikah. Begitupun dengan pergaulan muda/i di zaman sekarang ini semakin tidak baik, dengan maraknya hiburan-hiburan yang merusak jiwa remaja yang masih labil. Pergaulan bebas menjadi pemicu terjadinya pernikahan hamil di luarnikah yang membentuk keluarga muda, yang penuh keterpaksaan atas kondisi yang terjadi, tanpa disadari semua itu karena nafsu dan emosi pada usia muda yang tidak stabil.⁶

Istilah pernikahan wanita hamil/ pernikahan atas dasar kehamilan di luar nikah sering dikenal dengan istilah **MBA (Marriage By Accident)**⁷ yang artinya pernikahan kedua calon mempelai atas dasar hamil di luar nikah, dan calon mempelai wanita sedang dalam keadaan mengandung. Pernikahan wanita hamil adalah sebuah istilah pernikahan untuk seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya⁸. **MBA** merupakan masalah dalam kasus hukum

⁶ Encup Supriatna, *Pengasuhan Anak Pada Keluarga Muda Akibat Hamil Di Luar Nikah*, (UIN SGD Bandung: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 2 No. 1, 2019), h, 91, Pada <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/index/search/search?query=hamil&searchJournal=&authors=&title=&abstract=&galleyFullText=&suppFiles=&dateFromMonth=&dateFromDay=&dateFromYear=&dateToMonth=&dateToDay=&dateToYear=&dateToHour=23&dateToMinute=59&dateToSecond=59&discipline=&subject=&type=&coverage=&indexTerms=> Diakses Pada Minggu Senin, 2 Maret 2020

⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (UIN MALIKI: Press Intrass, 2013), Cet-3, hlm.59

⁸ Farhatul Aeni, *Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil di Luar Nikah*, (Cirebon: Kementrian Agama Republik Indonesia IAIN Syekh Nur Djati, 2015), hlm.34

maupun sosial,⁹ dalam banyak literatur sejarah¹⁰ psikologi fenomena hamil di luar nikah dianggap sebuah fenomena yang sudah biasa karena banyak terjadi baik di kota maupun di desa, dimana orang desa terkenal mempunyai agama yang masih kental daripada orang kota yang mudah terpengaruh oleh dunia luar. Namun hal demikian saat ini sudah tidak lagi berlaku karena baik orang desa maupun kota penomena *MBA* terus berulang setiap tahunnya.¹¹

Bisa pula pernikahan wanita hamil yakni pernikahan wanita yang sedang hamil dengan laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut menikahinya pada masa sedang atau setelah kehamilan tersebut terjadi tanpa sebelum adanya ikatan yang sah dari kedua belah pihak.

Namun, banyaknya putusan dari lembaga yang berwenang (Pengadilan Agama/KUA) dalam memberikan peradilan hak izin dispensasi nikah dalam memberikan persetujuan akan pernikahan tersebut, sementara mempelai wanita dalam keadaan hamil (di luar nikah/hasil dari perzinahan) menimbulkan pertanyaan besar tentang keabsahan status pernikahan tersebut. Alasan dan pertimbangan apakah yang melandasi tokoh terkait seperti hakim, untuk menyetujui dan membenarkan perkara tersebut.¹²

⁹ Fatkul Mujib, M.H (Hakim di Pengadilan Agama Kab. Bangka Barat), *Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (MBA) Dalam Perspektif Sosiokultural Masyarakat Metro Utara*, (Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 1)-([journal.iai-agussalimmetro.ac.id > index.php > algadhi > article](http://journal.iai-agussalimmetro.ac.id/index.php/algadhi/article), Juli 2019), Diakses Pada Minggu 29 Desember 2020.

¹⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (UIN MALIKI: Press Intrass, 2013), Cet-3, hlm.56

¹¹ Baihaki, *Fenomena Hamil di Luar Nikah*, (Universitas Islam Negeri Malik Maulana Ibrahim, Pusat Perpustakaan : Malang), hlm.2 , <http://etheses.uin-malang.ac.id/1838/4/09410034> , Diakses Pada Selasa 07-01-2020

¹² Muhammad Baihaqi, *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Teori Masalah (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)*, (Universitas Islam Negeri Wali Songo: Semarang, 2018), hlm.8, <http://eprints.walisongo.ac.id/9110/1/Skripsi%20112111033.pdf>, Diakses pada tanggal 07-01-2020

Begitupun kronologis yang terjadi di Desa Ciputri Kab. Pandeglang Provinsi Banten telah terjadi kasus pernikahan yang berlangsung setelah terjadi kehamilan bagi pasangan wanita yang dilakukan oleh pasangan pria sebelum mereka benar-benar sah dalam ikatan pernikahan sesuai *syariat* Islam ataupun secara hukum positif di Indonesia. Kejadian pernikahan atas dasar hamil diluar nikah ini sudah beberapa kali terjadi namun tidak banyak. Begitupun dengan presentase pertumbuhan terjadinya pernikahan ini tidak diketahui sangat jelas oleh pihak KUA wilayah setempat, karena diwilayah Kaduhejo ini masyarakat masih banyak melakukan pernikahan siri, yang lebih mudah dan simpel, dan bertujuan untuk menutupi aib keluarga untuk tidak menanggung rasa malu yang berlebih. Sehingga pihak KUA wilayah Kaduhejo tidak dapat mengetahui secara pasti berapa banyak pasangan yang melakukan pernikahan atas dasar hamil diluar nikah di wilayah Kaduhejo.¹³

Sebelum pernikahan atas dasar perzinahan itu diberlangsungkan ada tindakan pengajuan dari kedua belah pihak terhadap Pengadilan Agama bagi yang berada dibawah umur, untuk meminta dispensasi agar membolehkan pernikahan tersebut bisa dilakukan dalam jangka waktu kehamilan dan sebelum waktu melahirkan. Bahkan ada beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dengan bukti dibawah tangan atau yang dikenal dengan Nikah Siri. Setelah hal-hal tersebut dilaksanakan maka kedua calon pasangan pengantin tersebut langsung melaksanakan pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama) dan mengajukan sidang

¹³ Wawancara dengan Bapak Kosasih, yang merupakan salah satu staf di KUA Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Banten Pada Hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020

isbat nikah di Pengadilan Agama diwilayah setempat, agar pernikahan mereka dapat diakui secara perdata oleh negara.¹⁴

Ada salah satu kasus yang terjadi di Desa Ciputri, bahwa pernikahan wanita yang sedang hamil dan sebelumnya wanita itu belum pernah menikah “hamil diluar nikah” boleh dilaksanakan dalam keadaan calon mempelai wanita tersebut mengandung anak (hamil). Alasan KUA yang membolehkan pernikahan tersebut dapat dilaksanakan karena memiliki alasan yang bersandar kepada *maqāshidu as-syari'ah* (maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam) sehingga pernikahan itu diperbolehkan meskipun calon mempelai wanita dalam keadaan mengandung.

Berdasarkan kasus pernikahan yang terjadi Di Desa Ciputri tersebut peneliti memiliki hipotesis bahwa pernikahan tersebut tidak tepat untuk dilakukan sebelum lahirnya seorang anak yang ada dalam kandungan, dengan bertujuan untuk mengetahui kepastian akan anak yang ada didalam kandungannya dan selain itu wanita hendaklah melakukan masa *iddah* terlebih dahulu sebelum menikah¹⁵. Sebagaimana menurut pandangan ulama di Indonesia, menikahkan wanita hamil hasil zina kepada laki-laki yang menzinahnya hukumnya haram sampai ia melahirkan menikahkan wanita hamil hasil zina kepada laki-laki (bukan yang menzinahnya) hukumnya haram dan tidak sah sampai ia melahirkan.¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Kosasih, yang merupakan salah satu staf di KUA Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Banten Pada Hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020

¹⁵ Tiara Rifatunnisa, *Sanksi Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusam Pn Payakumbuh No.65/Pid.B.A/2013/Pn.Pyk.* (Bandung: Digilibuinsgd.2019), hlm.10

¹⁶ Wawan Showan Shalehuddin, *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) Tentang Muamalah (Masalah-Masalah Kontemporer)*.(Bandung: Persis Pers. 2013), hlm. 296

Hal-hal diatas memberikan ketertarikan peneliti untuk melanjutkan penelitian lebih dalam lagi mengenai kepastian hukum syariat Islam yang lebih jelas mengenai kondisi kasus pernikahan yang berlandaskan perzinahan di Desa Ciputri Kabupaten Banten, terlebih jika dikaitkan dengan tujuan dari *maqāshid as-syari'ah* (maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam), yang secara operasional memfokuskan pada aspek kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat dengan mempertimbangkan lima unsur yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penggunaan metode *maqashid syariah* ini bertujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadits¹⁷. Berdasarkan pertimbangan di atas diharapkan dapat memberi cahaya baru dalam pemahaman hukum Islam tentang perkara *MBA*, khususnya rumusan hukum yang lebih mengedepankan aspek moral dan kemaslahatan dalam memberlangsungkan pernikahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor yang mendorong terjadinya kasus *MBA* (*Marriage By Accident*) di Desa Ciputri Banten ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kasus *MBA* (*Marriage By Accident*) di Desa Ciputri Banten?
3. Bagaimana penerapan prinsip *maqāshidu syariah* dalam perkara *MBA* (*Marriage By Accident*) di Desa Ciputri Banten?

C. Tujuan Penelitian

¹⁷ Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999), hlm.123

Tujuan penelitian ini untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan, guna untuk melancarkan suatu penelitian di antaranya:

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya kasus *MBA (Marriage By Accident)* di Desa Ciputri Banten secara detail dan mendalam.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap kasus pernikahan terhadap kasus *MBA (Marriage By Accident)* Di Desa Ciputri Banten.
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip *maqashidu syariah* dalam perkara *MBA (Marriage By Accident)* di Desa Ciputri Banten.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini, tentunya sesuai dengan Rumusan Masalah di atas, diantaranya:

1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan, terutama yang terkait dengan masalah dalam penulisan skripsi dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan.
2. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan penambah wawasan terutama bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perkara *MBA*.
3. Bagi dunia pendidikan, sebagai masukan yang membangun khususnya di lingkup Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang Analisis mendalam tentang tinjauan hukum Islam terhadap perkara *MBA* di desa Ciputri-Banten.

E. Penelitian Terdahulu

Pada kali ini penulis melakukan studi penelitian terdahulu dari lima karya tulis yang menganalisa tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara *MBA*” (Kasus pernikahan atas dasar perzinahan) dalam pandangan hukum Islam ataupun perundang-undangan dari berbagai aspek sudut pandang. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap perkara *MBA* :

Berdasarkan penelitian terdahulu yang *pertama* dari Luk Luk Il Maknun dalam skripsinya nya yang diberi judul “Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)” ia mengungkapkan tentang: Pertama, putusan Pengadilan Agama Semarang yang mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan hamil dikarenakan untuk melindungi keluarga dari kepastian hukum. Dalam permohonan dispensasi nikah hakim mementingkan asas kepastian. Untuk melindungi status anak yang lahir setelah pernikahan demi memiliki kepastian hukum, agar anak tersebut setelah lahir memiliki nasab yang jelas. Kedua menurut hukum Islam menurut pendapat imam madzhab seperti Imam Syafii serta Imam Abu Hanifah memperbolehkan menikahi wanita yang sedang hamil oleh sebab zina, Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat, “Dan tidak boleh mengawini wanita hamil dari perbuatan zina oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, kecuali telah melahirkan dan telah habis masa iddah-nya”.

Persamaan dalam penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang hamil di luar nikah dan tinjauan hukum islam terhadap perkara tersebut yang dititik

fokuskan pada dispensasi putusan hakim. Adapun perbedaannya terletak pada bahasan penelitian yang menitik fokuskan pada dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Semarang yang selalu mengabulkan pengajuan dispensasi nikah dengan alasan hamil tinjauan hukum Islam itu sendiri mengenai dispensasi nikah dengan alasan hamil.

Kemudian, berdasarkan penelitian terdahulu yang *kedua* dari Farhatul Aeni dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura” dalam penelitiannya ia mengungkapkan tentang: Pandangan KHI yang berdasarkan pada pasal 53 ayat 3 yang menegaskan bahwa “dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir”. Jadi jika seseorang melakukan pernikahan dalam keadaan hamil, maka tidak perlu diadakannya nikah ulang. Sedangkan menurut ulama Desa Astanajapura juga berpendapat bahwa nikah ulang itu dibolehkan asal dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan untuk menguatkan pernikahan yang pertama tetapi anaknya tetap dihukumi anak diluar nikah dan tidak bisa dinasabkan pada ayahnya.

Persamaan yang terletak dalam penelitian tersebut adalah sama-sama dilatarbekangi dengan pernikahan hamil di luar nikah, namun perbedaanya adalah penelitian tersebut lebih menetapkan pada hukum nikah ulang menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan fiqih serta pandangan tokoh masyarakat dan KUA terhadap pelaksanaan nikah ulang.

Adapun berdasarkan penelitian terdahulu yang *ketiga* dari Mar'atus Solihah dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Studi Kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ” dalam penelitiannya ia mengungkapkan tentang penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah dan pandangan Islam terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah.

Adapun persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sama-sama dilatarbelakangi oleh kasus pernikahan di luar nikah namun ada sedikit perbedaan dimana dalam penelitiannya penulis lebih menitik fokuskan pada pandangan masyarakat terkait pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil di luar nikah dan dalih yang digunakan oleh masyarakat yang menganggap hal tersebut sudah lumrah hingga terkesan seperti biasa-biasa saja, walaupun jelas jika dengan kacamata Islam hal demikian sangatlah bertentangan.

Penelitian terdahulu yang *ke-empat* dari Muh Heri dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah di bawah Tangan Akibat Hamil di luar Nikah Studi Kasus di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang” dalam penelitiannya ia membahas tentang fenomena nikah di bawah tangan atau yang biasa dikenal dengan nikah *sirri* di Dusun Ketawang ia juga membahas tentang bagaimana status anak yang dilahirkan dari pernikahan hamil di luar nikah.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian di atas adalah masih dilatarbelakangi oleh fenomena hamil di luar nikah. Adapun perbedaannya adalah, pada penelitiannya peneliti lebih memfokuskan perkara nikah *sirri* itu sendiri, dan

faktor-faktor apa sajakah yang mengakibatkan pernikahan di bawah tangan itu terjadi di dusun Ketawang. Jika dalam penelitian-penelitian sebelumnya para peneliti tersebut murni membahas tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan hamil di luar nikah, maka pada penelitiannya Muh Heri lebih mengerucutkan pandangan hukum Islam terhadap perkara nikah di bawah tangan yang salah satunya disebabkan oleh hamil di luar nikah.

Pernikahan terdahulu yang *kelima* dari Gustina Nofitasari dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap Dispensasi Calon Istri yang Hamil di Luar Nikah” dalam penelitiannya ia menjelaskan tentang landasan legalitas dispensasi nikah bagi calon istri yang hamil di luar nikah dan uji kelayakan dalil yang dipakai oleh Majelis Ulama dalam Menyepakati perundang-undangan mengenai dispensasi nikah bagi calon istri yang hamil di luar nikah itu sendiri terkait dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 sebagai jalan keluar dari permasalahan hamil di luar nikah.

Persamaan dalam penelitian tersebut jelas terletak pada salah satu perkara yang melatarbelakangi kajian tersebut yaitu hamil di luar nikah. Namun, perbedaannya adalah terletak pada pemokusn perkara yang dipilih oleh peneliti yang lebih mendalami akan pandangan serta landasan-landasan dasar dari Majelis Ulama Indonesia itu sendiri terhadap dispensasi nikah bagi calon istri yang hamil di luar nikah.

Dari kelima penelitian terdahulu di atas, maka jelas nampak bahwasanya belum ada peneliti dari para peneliti sebelumnya yang membahas secara rinci serta mendalam tentang hukum pernikahan yang terjadi dalam kasus *MBA*. Oleh

karenanya dalam penelitian ini peneliti akan mngkupas secara ringkas, rinci, dan mendalam terkait tinjauan hukum islam terhadap perkara *MBA* di desa Ciputri-Banten berlandaskan maraknya pernikahan hamil di luar nikah pada masyarakat setempat.

F. Kerangka Pemikiran

Salah satu dari *Sunnatullah* yang hendak manusia lakukan adalah pernikahan, karena pernikahan merupakan sunnah bagi semua *makhluk* (manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan) sesuai dengan firmanya :

ومن كلّ شيء خلقنا زوجين لعلّكم تذكرون¹⁸

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin yang dimiliki antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)¹⁹. Halal dan haramnya atau sah dan tidaknya status dalam pernikahan sangatlah penting, karena hal demikian merupakan sebuah ikatan kokoh serta perjanjian kokoh yang harus dilaksanakan dengan cara yang benar mengikuti semua aturan yang telah disyariatkan dan telah diperundang-undangkan.

Salah satu sikap dan perilaku dari penyimpangan-penyimpangan sosial serta pelanggaran norma sosial yang sering terjadi dimasyarakat adalah kasus *MBA*. Pernikahan hamil di luar nikah tentunya terjadi karena faktor pasangan muda-mudi tersebut tidak dapat menahan hawa nafsu serta birahi liar yang dimiliki oleh

¹⁸ Kementrian Agama, *Tafsir Al-Quran*, (Jakarta: Mutiara, 1902), Az-Zāriyāt (51):49, hlm.522

¹⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.34

keduanya, serta kurangnya tekad untuk menjaga iman serta Islam yang dimiliki oleh mereka, demikian yang diungkapkan oleh H. Fauzi Amnur²⁰

Hamil di luar nikah adalah perempuan yang sedang mengandung atau bunting dari pernikahan suami istri yang sah²¹ yang mealampaui batas dan belum ditetapkan dan disahkan secara syariat²².

Dalam aturannya Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang perkara *MBA* atau pernikahan hamil di luar nikah tercantum pada pasal 53 ayat (1) “seorang wanita hamil di luar nikah dapat diperkawinkan dengan pria yang menghamilinya” kemudain diperjelas lagi dalam ayat (2) bahwasanya “ perkawinan dalam ayat 1 boleh dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu perkawinan anaknya²³.

Dalam prinsip *maqāshid as-syariah* terdapat salah satu poin yang berbunyi *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) yang dimana maksud dari menjaga keturunan agar tetap berada dalam *syariat* Allah SWT. Dengan menikah yang dijalankan sesuai prinsip *syariah* maka poin *hifz an-nasl* ini akan terlaksana sehingga tercapainya *maqāshid as-syariah* dalam pribadi seseorang.

Dari norma di atas maka perlu analisis lebih dalam akan halal dan haramnya atau sah dan batalnya pernikahan pada perkara *MBA*, sehingga tercapainya prinsip *maqāshid as-syariah*. Mengingat pernikahan dilangsungkan dalam kondisi calon mempelai wanita sedang dalam keadaan hamil, kelayakan atas status pernikahan

²⁰ Memed Humaidilah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hlm.31 dan 32

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.295

²² Ibid. hlm. 333

²³ Muh. Heri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Skripsinya: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah di Bawah Tangan Akibat Hamil di Luar Nikah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm.17

tersebut haruslah jelas dan rinci karena besentuhan langsung dengan ketetapan *syariat* dan perundang-undangan yang telah di tetapkan, meninjau masih banyaknya masyarakat yang awam perihal status hukum pernikahan dalam kasus perkara *MBA*.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, individu kelompok atau masyarakat, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁴

²⁴ Sudarsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reneka Cipta, 1991. hlm. 188

2. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dengan jenis penelitian kualitatif. Prosedur penelitian dalam metode ini, adalah dengan pengumpulan data deskriptif berupa kata (tertulis maupun lisan) dari objek yang diamati, kemudian disambung dengan pendekatan *anaytical field* (studi analisis lapangan) yaitu dengan mengamati kasus-kasus perkara pernikahan atas dasar *MBA* di Desa Ciputri-Banten yang kemudian dihubungkan dengan tinjauan hukum Islam terhadap perkara *MBA* itu sendiri.

Sehingga data yang diamati adalah data berupa kata atau kalimat maupun gambar dan bukan angka-angka²⁵. Data tersebut bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, catatan pribadi, memo atau dokumen resmi lainnya. Adapun metode merupakan alat untuk menemukan, mengembangkan, menguji realita data/fakta yang dianalisa, selain itu metode digunakan untuk mendapatkan kebenaran yang disusun sesuai dengan sistematika ilmu pengetahuan yang dapat dikomprehensifkan.

Metode ini lebih memfokuskan pada pengembangan pola pikir induktif dalam menarik suatu simpulan, jelasnya dari sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan titik fokus pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian. Perlu digaris bawahi dalam penelitian kualitatif poin yang lebih diutamakan adalah kedalaman

²⁵ Kriyantono, *Teknik Praktis Riset KOMunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. hlm.120

analisis yang berpijak pada data berupa kata, kalimat, serta gambar bukan data-data yang berupa angka²⁶. Dengan kata lain metode ini mencakup deskripsi naskah secara keseluruhan dari teks dan gambar yang terkandung di dalamnya, dilanjut dengan analisis teks agar sebuah interpretasi bisa dipahami secara sempurna.

3. Sumber Data

Sumber data yang terkait dalam penelitian ini yakni :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara khusus menjadi objek penelitian. Data primer dalam skripsi ini meliputi :

- 1) Dokumen salinan mengenai kasus *MBA (Marriage By Accident)* di Desa Ciputri Banten Tahun.
- 2) Hasil wawancara para tokoh yang terkait serta para pihak yang bersangkutan mengenai nikah atas landasan hamil di luar nikah di Desa Ciputri Banten.

b. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah sumber data yang menjadi pendukung data-data primer dalam melengkapi tema penelitian, dalam hal ini, sumber data dapat diperoleh dari dokumen, hasil wawancara atau arsip. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi kepustakaan yang berkaitan dengan perkara *MBA* baik itu berupa buku-buku catatan,

²⁶ Cristine Daymon dan Immi Holloway, *Qualitative Research method in Public Relations and Marketing Communication Routledge*, Yogyakarta: Cahya Wiratama, 2008. hlm.37

internet. Bahanbahan dari kepustakaan tersebut lalu dipahami dan ditafsirkan serta mengambil kesimpulan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Undang-undang No 1 1974 tentang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku referensial lainya yang relevan dengan perkara *MBA* dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknis pengumpulan data secara observasi dan langsung mengambil dari tempat/objek yang diteliti. Melalui data-data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan dalam penelitian dengan cara Tanya Jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dan secara langsung mewawancarai hakim, para tokoh yang terkait serta para pihak yang mengajukan permohonan nikah atas landasan hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Banten.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan penelaahan terhadap buku-buku referensial, jurnal atau yang lainnya yang berkaitan dengan perkara *MBA*

yang merupakan masalah yang diteliti. Dan tentunya data yang diambil dan diperoleh adalah data-data yang signifikan.

5. Analisa data

Analisis data yaitu mengkaji keterkaitan antara data-data yang terhimpun dengan kerangka pemikiran. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data yang diperoleh, yaitu:

- a. Mengkaji semua data yang diperoleh, baik itu hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan.
- b. Mengklasifikasinya kedalam satuan unit dengan pernyataan penelitian.
- c. Mengklasifikasikan lagi data yang telah diklasifikasikan tadi dengan kerangka pemikiran.
- d. Mencari titik temu antara data referensi yang telah terkumpul dengan realita dilapangan.
- e. Mencari kesimpulan yang diperoleh dari data yang di analisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.